

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan LKIP Tahun 2016 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016.

LKIP Tahun 2016 ini menyajikan keberhasilan maupun faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah. Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat merupakan hasil kinerja selama tahun 2016 atau tahun ke 3 dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018. LKIP 2016 masih menggunakan nomenklatur dan susunan organisasi yang lama yaitu Dispenda Provinsi Jawa Barat tapi setelah Januari 2017 terjadi pergantian nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat baru menjadi Bapenda Provinsi Jawa Barat yang akan dituangkan pada penyusunan LKIP Tahun 2017.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2013-2018.

Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2016 ditetapkan 9 sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja sasaran.

Kesembilan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Tercapainya penerimaan pendapatan daerah;
2. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;
3. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah;
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan ;

6. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah;
7. Menigkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah;
8. Menigkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja;
9. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM).

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator sasaran dan keberhasilan kinerja pada tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kompetensi pegawai yang secara terus menerus ditingkatkan;;
3. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang setiap aktivitas kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
4. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelolaan pendapatan.

Pencapaian Rencana Stratejik Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 23 (delapan belas) sasaran berhasil dicapai dengan nilai lebih dari 80 %
2. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 60,00 – 79,90 %
3. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 50 – 59,90 %
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 49,9 %

Pada Tahun 2016 Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 706.802.784.465,00 dengan realisasi sebesar Rp. 637.910.185.811,00 (90.25%) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya	Target Perubahan (Rp)	Realiasi (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Langsung	370.695.848.295,00	313.196.140.168,00	84.49
Belanja Tidak Langsung	336.106.936.170,00	324.714.045.543,00	96.61
Total Biaya	706.802.784.465,00	637.910.185.811,00	90.25

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh jajaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.

Bandung, Maret 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

H. DADANG SUHARTO, SH., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580823 198603 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berisi paparan pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator sasaran yang telah diperjanjikan dengan Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 ini masih menggunakan nomenklatur lama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dimana pada Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat baru menjadi Bapenda Provinsi Jawa Barat berdasarkan meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan serta implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaiannya LKIP ini, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

H. DADANG SUHARTO, SH., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580823 198603 1 008

BAB I **PENDAHULUAN**

1. 1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dituntut selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pertambahan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi Jawa Barat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. 2 Tujuan Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2016 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 yang telah diamanahkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui program kerja instansi yang disusun secara periodik.

1. 3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Perubahan dari UUD No. 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Pearturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
10. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2010, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Nomor 24 Tahun 2015 Seri E Tanggal 25 Maret 2015);
17. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 060.04/189/Org Tanggal 25 Januari 2017 Perihal Penyusunan LKIP Tahun 2016.

1. 4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat di bidang pendapatan daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di bidang pendapatan daerah. Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Nomor 24 Tahun 2015 Seri E Tanggal 25 Maret 2015), salah satu fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan penyelenggaraan fasilitas pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum.

1. Kedudukan

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan;
- b. Pendapatan dan pelayanan umum meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, dan non pajak, pengendalian dan pembinaan serta UPTD;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pendapatan secara internal meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, non pajak, pengendalian dan pembinaan, UPTD, pembinaan teknis fungsional pendapatan daerah dan pelayanan umum;
- e. Tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

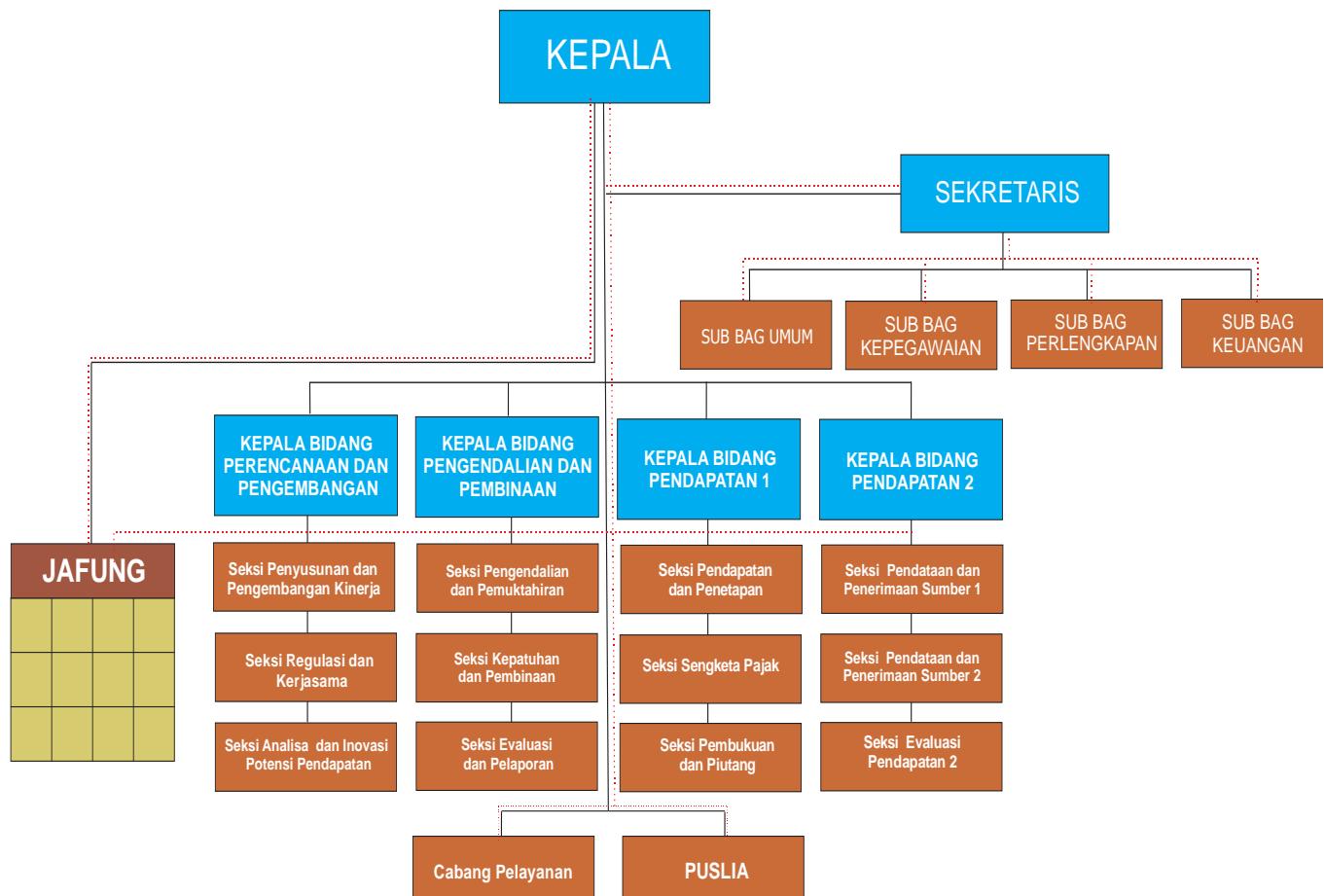
Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Nomor 24 Tahun 2015 Seri E Tanggal 25 Maret 2015); dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

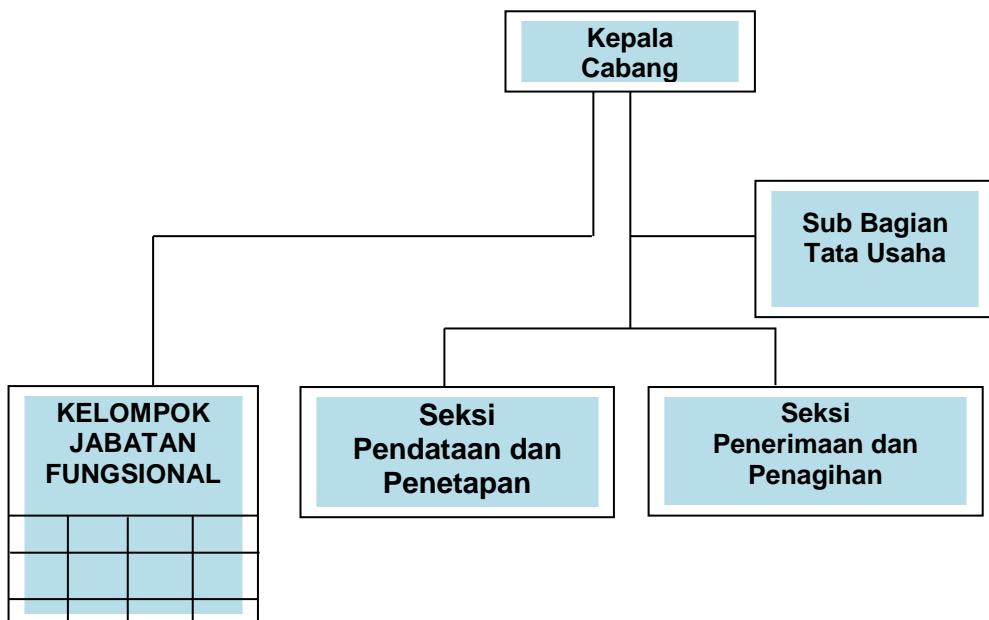
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Subbagian Kepegawaian
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum
 - 4) Subbagian Perlengkapan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
 - 1) Seksi Regulasi dan Kerjasama
 - 2) Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Pendapatan Daerah
 - 3) Seksi Penyusunan dan Pengembangan Kinerja
- d. Bidang Pendapatan I
 - 1) Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan
 - 2) Seksi Sengketa Pajak

- 3) Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan
- e. Bidang Pendapatan II
 - 1) Seksi Pendataan dan Penerimaan Sumber I
 - 2) Seksi Pendataan dan Penerimaan Sumber II
 - 3) Seksi Evaluasi Pendapatan II
- f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan
 - 1) Seksi Pembinaan dan Kepatuhan
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pemitakhiran
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- g. Cabang Pelayanan Dispenda
- h. Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA)
 - 1) Kasubag Tata Usaha
 - 2) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan
 - 3) Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

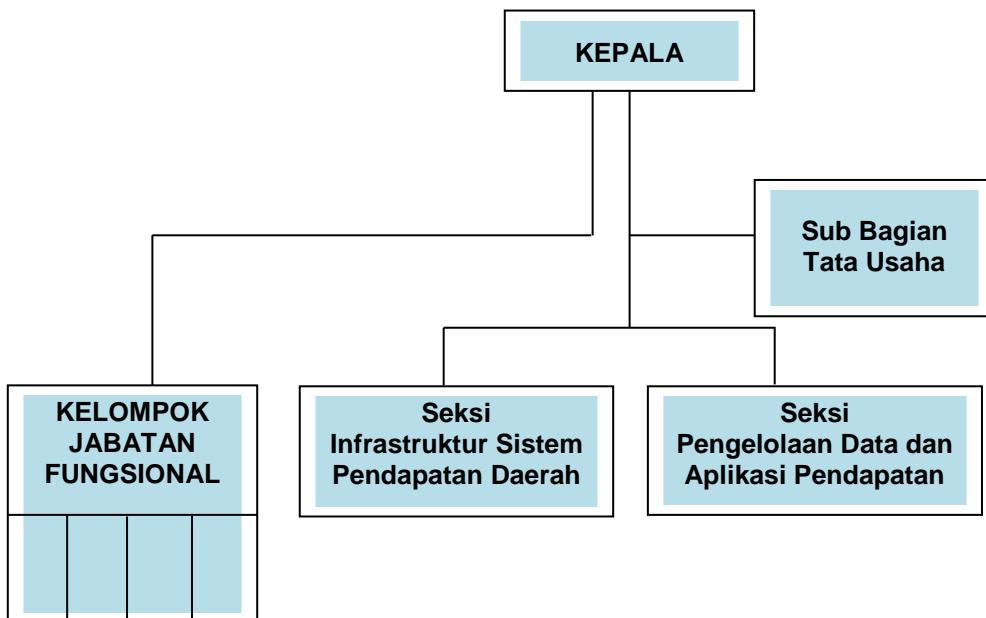
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Struktur Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Provinsi, adalah sebagaimana gambar dibawah ini :



Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA), adalah sebagai berikut :



Core Business Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi
- 3) Meningkatkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik
- 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- 5) Meningkatkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik

Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan memiliki kualitas pegawai cukup baik dan parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan sarjana (S-1) sebanyak 342 orang sebesar 38,23% dengan persentase pasca sarjana (S-2) sebanyak 182 orang (20,66%) Diploma III sebanyak 32 orang (3,63%)

Jumlah total pegawai yang memiliki pendidikan terakhir lulusan perguruan tinggi sebanyak 556 orang dan sebesar 63,11% .

Data Pegawai dengan klarifikasi berdasarkan jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Pejabat Struktural	154 orang	17,48
2.	Pejabat Fungsional : A. Fungsional Pustakawan B. Fungsional Dokter Gigi Pertama C. Perawat Gigi Pelaksana	1 orang 1 orang 1 orang	0,12 0,12 0,12
3.	Pelaksana	724 orang	82,18
	Total	881 orang	100,00

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Stata-2	182	20.66
2.	Strata-1	342	38.82
3.	Diploma 3	32	3.63

4.	SLTA	296	33.60
5.	SLTP	14	1.59
6.	Sekolah Dasar	15	1.70
7.	Jumlah	881	100,00

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Pria	690	78,32
2.	Wanita	191	21,68
	Jumlah	881	100,00

4. Berdasarkan Usia

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Usia 61 s/d 60	74	23,12
2.	Usia 51 s/d 55 tahun	216	25,77
3.	Usia 46 s/d 50 tahun	228	20,24
4.	Usia 41 s/d 45	172	13,72
5.	Usia 36 s/d 40	120	6,53
6.	Usia 30 s/d 35	50	10,29
7.	Usia 20 s/d 29	21	0,33
	Jumlah	881	100

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat meliputi :

BAB I PENDAHULUAN : menyajikan latar belakang, tujuan penulisan, landasan hukum, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA yang meliputi Perencanaan, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Program Kegiatan dan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA terdiri :

- A. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau meningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 2. Menbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya;
 5. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran yaitu menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah – langkah di masa yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Rencana strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua pembangunan jangka panjang daerah provinsi Jawa Barat yaitu "**Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua**" hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, dan penyempurnaan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pendapatan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD) 2005 – 2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) 2013 - 2018, maupun dalam kebijakan strategis bidang pendapatan daerah

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian visi dan misi organisasi pada tahun 2013-2018.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor pengelolaan pendapatan daerah dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah
dan Akuntabel**

Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Makin Optimal**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Yang Berdaya Saing**

2.1.2 Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategic serta kemampuan sumberdaya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun renstra Dinas Pendapatan Yaitu antara tahun 2013-2018. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap Indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran Diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi operasionalnya serta isu-isu strategik yang ada, maka tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Untuk Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang makin Optimal, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatkan Penerimaan Daerah yang makin optimal, dengan Sasaran : tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikatornya Yaitu :
 - a) Kenaikan pendapatan daerah antara tahun anggaran
 - b) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)

2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran :
 - a) Terdatanya potensi Pajak Daerah dan bukan Pajak Daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Air Permukaan
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 2) Jumlah Wajib Retribusi
 - b) Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah
 - c) Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Potensi wajib pajak yang terpungut
 - 2) Potensi Wajib Retribusi yang terpungut
 - 3) Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima

Untuk Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Berdaya Saing, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan Aparatur yang berkompeten dan terpercaya, dengan sasaran : Meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :
 - a) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal
 - b) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan fungsional
 - c) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif
2. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b) Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya :
 - 1) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran.
 - 2) Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan
 - 3) Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan
 - c) Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Tingkat gangguan jaringan dan sistem
 - 2) Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras teknologi Informasi

3. Memantafkan kinerja organisasi, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya Sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Prosentase perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan
- b) Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dengan indikatornya
 - 1) Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)
 - 2) Jumlah temuan SPI antar tahun
 - 3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan Internal pengawasan
 - 4) Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh instansi Penilai

2.1.3 Kebijakan dan Program

Agar tujuan dan sasaran tercapai dengan baik, maka diperlukan kebijakan dan program. Arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang daerah (PJPD) Tahun 2005 – 2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) Tahun 2013 – 2018, dan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek-objek PAD;
- b. Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana, prosedur pelayanan serta megoptimalkan peran Badan Pengawas BUMD;
- c. Memperkuat kinerja pemungutan PPh OPDN dan PPh pasal 21, Pajak ekspor, dan PPh Badan melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dengan instansi perpajakan nasional;
- d. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
- e. Meningkatkan pemanfaatan asset dan keuangan daerah;
- f. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi perumusan alokasi dana perimbangan;
- g. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;
- h. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi;

- i. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;
- j. Mengembangkan model dan rapat koordinasi yang makin efektif;
- k. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai fihak untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah;
- l. Mengembangkan standar kompetensi aparatur pengelola pendapatan;
- m. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD Penghasil;
- n. Menyempurnakan sistem reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;
- o. Melanjutkan penyediaaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- p. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah
- q. Mengembangkan pusat-pusat layanan perpajakan terpadu yang terintegrasi dengan aktivitas layanan social dan ekonomi public;
- r. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
- s. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan Rakor yang teruji;
- t. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan pemerintah pusat, OPD penghasil, Kab/Kota , Unsur POLRI dan Jasa Raharja serta perbankan daerah;
- u. Mengembangkan dan menerapkan model-model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 – 2018, maka Dinas Pendapatan mempersiapkan langkah langkah sebagaimana yang tertuang didalam kebijakan dan program pada Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 hingga kondisi sumberdaya organisasi yang tersedia telah dirumuskan strategi berikut :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;
- b) Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD;
- c) Optimalisasi pemungutan PBB, PPh OPDN dan PPh pasal 21;
- d) Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi Nasional dan Regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah ;
- e) Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
- f) Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- g) Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

- h) Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan dana perimbangan dengan unsure pemerintah pusat;
- i) Inisiasi sumber-sumber pendapatan dari masyarakat;
- j) Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;
- k) Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
- l) Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh *stakeholder*;
- m) Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
- n) Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;
- o) Menerapkan SOP yang makin teruji;
- p) Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;
- q) Meningkatkan penyediaan sentra-sentra layanan pendapatan yang pusat-pusat komunitas publik;
- r) Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
- s) Penerapan model dan metoda koordinasi pendapatan yang makin efektif;
- t) Mempertajam sistem pengendalian kinerja;

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 11 (sebelas) program dan 208 (dua ratus delapan) kegiatan Tahun 2016, sebagai berikut :

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 11 (sebelas) program dan 208 (dua ratus delapan) kegiatan Tahun 2016, sebagai berikut :

Kinerja Organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selain itu juga faktor kepemimpinan dapat mempengaruhi dengan indikasi pada kemampuan pimpinan dalam membuat kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk mengetahui rencana kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2016, maka perlu adanya penjelasan dari elemen dari sasaran dan indikatornya.

Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1. Kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	%	10
		2. Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (di luar dana BOS)	%	84
2	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	3. Jumlah potensi wajib pajak a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Pajak Air Permukaan c. Pajak Bahan Bakar	Kbm Wp Wapu	16juta 785 24
		4. Jumlah Wajib Retribusi,	Wr	150
		5. Jumlah objek penerimaan pendapatan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	Objek	35
		6. Potensi wajib pajak yang terpungut	%	75
3.	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	7. Potensi wajib retribusi yang terpungut	%	85
		8. Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima	%	100
		9. Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	%, %	36.7 17.1
4.	Meningkatnya kualitas SDM	10. Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	77
		11. Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	%	11
		12. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,6
5.	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	13. Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	Sentra layanan/jumlah wajib pajak	1:400
		14. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	%	90
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah			

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET KINERJA
		15.	Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	%	100
7.	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	16.	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	%	1.6
		17.	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras	%	1.6
8.	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	18.	Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	kali	90
9.	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	19.	Tingkat deviasi pelaksaan SOP dan SP	%	10
		20.	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)		
		21.	Jumlah temuan SPI antar tahun	Temuan	350
		22.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawa	%	100
		23.	Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai	%	81,5

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 641.773.572	APBD
2.	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 1.141.250.000	APBD
3.	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Rp. 37.338.554.000	APBD
4.	Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp. 183.000.000	APBD
5.	Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur	Rp. 3.380.520.000	APBD
6.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 62.725.620.231	APBD
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 248.013.702.24 5	APBD
8.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 46.288.262.906	APBD
9.	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Rp. 5.743.545.000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
10.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 273.758.000	APBD
11	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	Rp. 1.225.474.500	APBD
Jumlah		Rp. 406.955.460.454	APBD

Berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 berikut anggaran yang tersedia untuk Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun rencana kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang mencakup sasaran berikut indikator kinerjanya, program dan kegiatan yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta targetnya. Dari 23 Sasaran Strategis ditetapkan 9 Sasaran Strategis yang merupakan Program Unggulan yang dipenjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016.

2.3 Program Kegiatan dan Anggaran

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang danggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang didanai dari Belanja Langsung terdiri dari 11 (sebelas) Program dan 208 (dua ratus delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	2	3
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	641.773.572.00	546.343.572.00
1. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	641.773.572.00	546.343.572.00
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.141.250.000.00	979.947.500.00
2. Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	184.300.000.00	184.300.000.00
3. Tatanan Teknis Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat	95.500.000.00	95.500.000.00
4. Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispnda Jabar	90.750.000.00	90.750.000.00
5. Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jawa Barat	356.600.000.00	337.847.500.00
6. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispnda Jabar	90.750.000.00	90.750.000.00
7. Penyusunan Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor E Samsat Via ATM	180.800.000.00	180.800.000.00
8. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	37.338.554.000.00	34.075.648.450.00
8. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	910.096.700.00	528.001.700.00
9. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	628.008.650.00	414.893.650.00
10. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	2.061.746.000.00	1.700.860.000.00
11. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	828.115.900.00	666.645.900.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
12. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	539.719.800.00	515.884.800.00
13. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	1.224.219.650.00	1.211.529.650.00
14. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	945.081.350.00	853.711.350.00
15. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	1.361.468.000.00	1.439.667.000.00
16. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1.603.928.850.00	831.708.850.00
17. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	2.080.722.750.00	1.248.534.200.00
18. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1.419.140.600.00	1.311.525.600.00
19. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	1.214.568.200.00	1.131.688.200.00
20. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	1.346.671.050.00	1.445.356.050.00
21. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	452.191.000.00	396.446.000.00
22. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	1.344.767.900.00	1.336.182.900.00
23. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1.143.665.650.00	1.170.940.650.00
24. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1.272.335.650.00	1.323.500.650.00
25. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haureulis	707.736.300.00	717.386.300.00
26. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	1.491.435.850.00	1.516.665.850.00
27. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1.459.559.850.00	1.510.294.850.00
28. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	940.132.200.00	742.427.200.00
29. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah	975.146.750.00	782.451.750.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan		
30. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	886.566.600.00	732.291.600.00
31. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	988.469.600.00	883.136.600.00
32. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	1.110.360.900.00	1.064.810.900.00
33. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1.028.636.000.00	929.334.000.00
34. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1.251.331.350.00	1.291.624.850.00
35. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1.398.737.300.00	1.505.693.800.00
36. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	688.610.300.00	632.650.300.00
37. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1.266.750.350.00	1.434.785.350.00
38. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	1.112.893.400.00	1.210.543.400.00
39. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	690.180.000.00	736.990.000.00
40. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	503.800.500.00	398.440.500.00
41. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	461.759.050.00	459.044.050.00
9. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	183.000.000.00	393.300.000.00
42. Bimbingan Teknis Aparatur di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	183.000.000.00	393.300.000.00
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.380.520.000.00	3.324.598.000.00
43. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dipenda Provinsi Jawa Barat	757.650.000.00	757.650.000.00
44. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Depok I	67.100.000.00	67.100.000.00
45. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok II Cinere	68.050.000.00	68.050.000.00
46. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan	94.850.000.00	56.875.000.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor		
47. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bogor	64.050.000.00	64.050.000.00
48. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	60.660.000.00	60.660.000.00
49. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	70.050.000.00	70.050.000.00
50. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	57.950.000.00	57.950.000.00
51. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	62.000.000.00	62.000.000.00
52. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bekasi	103.600.000.00	101.040.000.00
53. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	89.850.000.00	89.850.000.00
54. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	73.200.000.00	71.970.000.00
55. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	78.100.000.00	76.670.000.00
56. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	61.000.000.00	61.000.000.00
57. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Cirebon	77.700.000.00	77.700.000.00
58. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	74.650.000.00	74.650.000.00
59. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	54.900.000.00	54.900.000.00
60. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	61.000.000.00	61.000.000.00
61. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	73.350.000.00	73.350.000.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
62. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	59.850.000.00	59.850.000.00
63. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	69.950.000.00	69.950.000.00
64. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	99.100.000.00	96.800.000.00
65. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	85.400.000.00	85.400.000.00
66. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	94.550.000.00	94.550.000.00
67. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	118.450.000.00	129.000.000.00
68. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	100.450.000.00	100.450.000.00
69. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	103.700.000.00	100.738.000.00
70. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	73.200.000.00	70.920.000.00
71. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	100.250.000.00	97.750.000.00
72. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	67.000.000.00	65.100.000.00
73. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	57.950.000.00	56.145.000.00
74. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I	71.310.000.00	65.010.000.00
75. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran	56.150.000.00	54.535.000.00
76. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cimahi	64.050.000.00	64.050.000.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
77. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Banjar	51.850.000.00	50.235.000.00
78. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	57.600.000.00	57.600.000.00
11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	62.725.620.231.00	66.370.878.979.00
79. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	37.672.249.218.00	40.873.200.000.00
80. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok I	1.215.070.312.00	1.148.261.644.00
81. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok II Cinere	561.050.000.00	576.050.000.00
82. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	874.155.300.00	880.635.250.00
83. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bogor	705.333.312.00	714.481.262.00
84. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	600.822.856.00	609.900.856.00
85. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	532.101.281.00	545.185.605.00
86. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	454.223.856.00	489.507.500.00
87. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	677.079.800.00	684.180.400.00
88. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bekasi	999.055.312.00	998.047.550.00
89. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	981.264.000.00	985.332.900.00
90. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1.254.600.000.00	1.720.964.000.00
91. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	563.125.000.00	571.149.300.00
92. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	380.960.000.00	526.760.000.00
93. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cirebon	785.560.000.00	750.453.000.00
94. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumber	601.060.800.00	607.582.650.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
95. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	388.245.000.00	384.495.000.00
96. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Indramayu I	690.120.000.00	697.095.000.00
97. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	1.338.276.856.00	1.240.300.000.00
98. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	684.220.000.00	647.675.200.00
99. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	834.679.856.00	842.585.400.00
100. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1.282.750.000.00	1.254.024.400.00
101. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	741.083.312.00	736.383.263.00
102. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	558.472.856.00	539.518.100.00
103. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	319.930.000.00	326.655.000.00
104. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Bandung I Rancaekek	494.235.856.00	498.933.300.00
105. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	782.040.000.00	780.273.000.00
106. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	413.325.000.00	421.821.488.00
107. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	536.837.856.00	529.530.856.00
108. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	527.511.856.00	547.511.856.00
109. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	608.433.312.00	573.373.312.00
110. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	577.290.856.00	578.511.583.00
111. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	501.740.856.00	516.740.856.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
112. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Cimahi	368.189.856.00	363.700.011.00
113. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Banjar	588.441.856.00	569.141.912.00
114. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	1.632.084.000.00	1.640.917.525.00
12. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	248.013.702.245.00	206.494.871.416.01
115. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	23.186.270.000.00	34.793.099.000.00
116. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	825.403.000.00	1.112.163.625.00
117. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	1.031.508.000.00	1.548.208.450.00
118. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	527.952.000.00	772.913.216.00
119. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1.757.672.700.00	2.114.378.872.00
120. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	202.000.000.00	482.969.100.00
121. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	2.016.743.000.00	2.815.179.137.00
122. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	1.101.661.000.00	2.058.104.900.00
123. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	459.398.000.00	468.398.000.00
124. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	250.550.000.00	542.554.450.00
125. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	401.150.000.00	774.385.738.00
126. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	991.138.600.00	1.114.808.450.00
127. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	819.612.000.00	773.900.078.28

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
128. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1.363.780.000.00	1.912.168.582.00
129. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1.933.840.000.00	2.323.065.950.00
130. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	3.344.588.000.00	3.918.744.996.00
131. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	9.955.711.600.00	10.197.861.100.00
132. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	943.870.000.00	1.245.461.450.00
133. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	776.570.278.00	1.265.853.978.00
134. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	812.215.000.00	1.095.942.240.00
135. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	749.800.000.00	993.505.950.00
136. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten I Rancaekek	1.002.493.000.00	1.285.713.700.00
137. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung II Soreang	836.582.500.00	1.502.870.500.00
138. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	540.073.000.00	702.009.794.83
139. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	525.500.000.00	1.009.301.732.00
140. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	352.112.000.00	882.919.150.00
141. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1.729.070.800.00	2.012.169.900.00
142. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	354.600.000.00	1.076.259.950.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
143. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	496.492.000.00	795.587.950.00
144. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	553.526.000.00	894.173.157.00
145. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	1.094.741.000.00	1.125.595.008.66
146. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	3.793.490.000.00	3.424.297.000.00
147. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	40.566.569.513.00	22.859.803.701.00
148. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	27.236.977.601.00	24.536.332.700.00
149. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	12.572.450.000.00	12.170.125.000.00
150. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	33.696.125.859.00	12.573.094.101.00
151. Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	12.679.917.789.00	12.438.431.105.00
152. Pembangunan Gedung Mess dan Aula Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di CPDP Wilayah Kota Cimahi	14.235.126.000.00	14.235.126.000.00
153. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	24.956.778.417.00	20.082.353.187.00
154. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	17.339.643.588.00	565.040.517.24
10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	46.288.262.906.00	51.496.727.378.00
155. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dispenda Provinsi Jawa Barat	12.348.767.541.00	15.638.411.589.00
156. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok I	731.265.000.00	737.439.400.00
157. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok II Cinere	835.398.000.00	861.005.108.00
158. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	1.091.560.725.00	1.115.835.672.00
159. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bogor	788.007.500.00	841.093.268.00
160. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	1.171.555.000.00	1.194.193.417.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
161. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	745.000.000.00	756.162.688.00
162. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	596.300.000.00	606.678.088.00
163. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	672.693.150.00	665.827.150.00
164. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1.414.968.000.00	1.348.982.450.00
165. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	839.573.000.00	851.372.704.00
166. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1.407.579.000.00	1.365.792.200.00
167. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	781.640.000.00	799.047.586.00
168. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	897.764.000.00	1.366.621.336.00
169. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Cirebon	1.164.794.000.00	1.124.673.500.00
170. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	918.421.690.00	897.960.690.00
171. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	664.773.000.00	1.009.393.000.00
172. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1.057.257.000.00	945.186.350.00
173. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	687.339.000.00	685.376.354.00
174. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	774.568.000.00	713.169.400.00
175. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1.031.078.000.00	1.033.601.938.00
176. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1.251.550.000.00	1.267.965.240.00
177. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	1.179.296.000.00	1.292.851.240.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
178. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	947.976.800.00	1.072.678.708.00
179. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1.756.171.500.00	2.229.416.835.00
180. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	1.124.383.000.00	1.137.261.556.00
181. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1.039.989.000.00	1.061.338.570.00
182. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1.024.904.000.00	1.035.642.380.00
183. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1.212.090.000.00	1.185.277.914.00
184. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	711.453.000.00	728.893.750.00
185. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	599.850.000.00	613.875.974.00
186. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	1.489.657.000.00	1.485.942.443.00
187. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	723.417.000.00	1.167.861.100.00
188. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Cimahi	1.371.868.000.00	1.440.084.630.00
189. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Banjar	556.000.000.00	542.243.450.00
190. Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	679.356.000.00	677.569.700.00
11. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	5.743.545.000.00	5.422.020.500.00
191. Penyusunan Aplikasi dan Dashboard Info Layanan Perencanaan Pendapatan dan Belanja	167.994.000.00	210.194.000.00
192. Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	718.575.000.00	718.575.000.00
193. Rapat Kerja Pendapatan Daerah	459.900.000.00	426.450.000.00
194. Sosialisasi, Monitoring dan Koordinasi Pajak Daerah	1.030.800.000.00	959.300.000.00
195. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II	440.166.000.00	420.650.000.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
196. Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber II	447.500.000.00	402.000.000.00
197. Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber I	325.000.000.00	325.000.000.00
198. Kajian Regulasi Pendapatan	248.600.000.00	199.500.000.00
199. Rapat Kerjasama Pendapatan Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi	253.100.000.00	253.100.000.00
200. Peningkatan kapasitas Penggalian Potensi Pendapatan Daerah	978.010.000.00	816.650.000.00
201. Kapita Selekta	178.350.000.00	178.171.500.00
202. Kajian Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah	145.550.000.00	164.050.000.00
203. Penyusunan SOP	150.000.000.00	150.000.000.00
204. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 34 CPDP	200.000.000.00	198.380.000.00
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	273.758.000.00	273.758.000.00
205. Penyusunan RKA 2017, DPA Tahun 2016, DPA Pergeseran dan DPPA Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	100.000.000.00	100.000.000.00
206. Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	173.758.000.00	173.758.000.00
13. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	1.225.474.500.00	1.317.754.500.00
207. Monitoring Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	100.000.000.00	100.000.000.00
208. Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dispenda Provinsi Jawa Barat	1.125.474.500.00	1.217.754.500.00
Jumlah Belanja Langsung	406.955.460.454.00	370.695.848.295.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	342.093.242.490.00	336.106.936.170.00
Total Belanja	749.048.702.944.00	706.802.784.465.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran 4 dan 5.

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Than 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Business* Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana visi, menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	Green
2	60 - 79,9	Baik	Blue
3	50 - 59,9	Sedang	Yellow
4	0 - 49,9	Kurang	Red
5	0	Data Tidak Lengkap	Grey

Sumber : Aplikasi eSakip Jabar

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2016. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Dinas Pendapatan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Stratejik

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2014 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2015 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2016 (%)	Kriteria
1	Kenaikan Pendapatan Daerah	%	10	16.13	161.30	SB	10	8.75	87.5	B	10	15.36	153.60	SB
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana DAK)	%	82	82.029	100.04	B	83	86.54	105.54	SB	84	84.40	100.48	SB
3	Jumlah Potensi Wajib Pajak	%	-	-	100.21	SB	-	-	134.42	SB	100	100.03	100.03	SB
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	kbm	13.000.00	9.218.671	70.92	-	16.900.00	14.736.803	87.20	-	16.000.00	16.085.121	100,53	SB
	b. Pajak Air Permukaan	wp	600	685	114.17	-	19	39	205.26	-	785	785	100	SB
	c. Pajak Bahan Bakar	Rupiah	1.834 T	2.119 T	115.54	-	19	21	110.53	-	24	24	100	SB
4	Jumlah Wajib Retribusi	wr	116	145	125	SB	124	165	133.06	SB	150	159	106,00	SB
5	Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	Jenis Objek Penerimaan	31	42	135.49	SB	31	33	106.45	SB	35	36	102,86	SB
6	Potensi wajib pajak yang terpungut	%	75	103.33	137.78	SB	75	102.39	136.52	SB	75	86,51	115,35	SB
7	Potensi wajib retribusi yang terpungut	%	75	113.73	151.64	SB	75	124.32	165.76	SB	85	124.21	146.13	SB

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2014 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2015 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2016 (%)	Kriteria
8	Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima	%	100	128,72	127,72	SB	100	145,67	145,67	SB	100	104,93	104,93	SB
9	proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	% % %	38,69 15,5	39,54 18,16	109,67	SB	38,5 16,1	38,83 16,36	107,45	SB	36,9 17,7	39,00 21,00	112,50 106,00 119,00	SB
10	proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	75	36,32	48,43	K	76	81,41	107,12	SB	77,00	126,68	164,52	SB
11	proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	%	9	9,1	100,89	SB	15	9,85	65,63	K	11	17,82	162,00	SB
12	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77,5	81,40	104,85	SB	82,5	82,11	99,53	B	82,5	82,69	100,23	SB
13	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	Sentra layanan \wp	1:200	1:284	142,46	SB	1:300	1:233	128,75	SB	1:400	1:192	157	SB
14	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	%	80	96,38	120,48	SB	85	96,23	113,21	SB	90	100	111,12	SB
15	Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	%	80	80	100	B	85	85	100	B	90	90	100	SB
16	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	%	2	0,99	202,00	SB	1,8	0,127	1,417	SB	1,6	1,37	212,77	SB
17	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	%	2	1,09	183,47	SB	1,8	1,62	202,00	SB	1,6	0,01	16,000	SB
18	Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	kali	100	133,3	133,3	SB	90	127,27	141,41	SB	90	95,25	105,82	SB

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2014 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2015 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2016 (%)	Kriteria
19	Defiasi pelaksanaan SOP dan SP	%	20	5,67	352,73	SB	15	6	353,33	SB	10	0	100	SB
20	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)	%	90	99,68	110,76	SB	92	99,85	108,53	SB	94	99,90	106,29	SB
21	Jumlah temuan SPI antar tahun	Temuan	92	99,68	117,78	SB	15%	99,85	108,53	SB	350	333	105,10	SB
22	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	%	100	94,44	94,44	B	100	100	100	B	100	100	100	SB
23	Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai	point	77	77,63	100,82	SB	75	70,46	93,94	B	81,5	81,96	100,57	SB

Keterangan :

- PK : Pencapaian Kinerja
- Dilakukan Revisi Renstra pada Tahun 2015 dan 2016

Implementasi Rencana Stratejik Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2016 mencakup 9 sasaran dengan 23 indikator sasaran, Dari penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan metode kerja tersebut diatas, semua sasaran berhasil dicapai dengan baik,

Capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2016 dapat diuktisarkan sebagai berikut :

5. 23 (delapan belas) sasaran berhasil dicapai dengan nilai lebih dari 80 %
6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 60,00 – 79,90 %
7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 50 – 59,90 %
8. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 49,9 %

3.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Stratejik

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2013 – 2018,

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat memiliki 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran,

Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3,1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 dan 2

Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Kenaikan Pendapatan Daerah antar tahun anggaran	%	10	15,36	153,60	87,5
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana DAK)	%	84	84,40	100,48	105,54

Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun 2015 – 2016

NO.	URAIAN	2015 (Rp)	%	2016 (Rp)	%	Kenaikan Pendapatan Daerah (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	24.240.445.765.650	101.08	27.694.035.120.859	105.54	14.25
1.1	Pendapatan Asli Daerah	16.263.235.947.268	105.50	17.042.895.113.672	106.43	4.79
1.1.1	Pajak Daerah	14.617.071.393.160	102.39	15.727.483.589.791	104.76	7.60
1.1.2	Retribusi Daerah	73.459.165.719	124.48	73.504.738.396	105.09	0.06
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	281.661.628.120	101.06	322.402.263.906	96.34	14.46
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1.291.043.760.269	161.19	919.504.521.579	108.32	(28.78)
1.2	Dana Perimbangan	2.506.877.511.840	82.29	10.622.671.443.683	104.19	323.74
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	5.470.332.306.542	99.09	28.468.563.504	99.30	(99.48)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Pendapatan Daerah Tahun 2015 yaitu sebesar Rp, 24,240,445,765,650,00 sedangkan tahun 2016 tercapai sebesar Rp, 27,964,035,120,859,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp, 3,723,589,355,209,00 atau sebesar 15,36% terhadap tahun 2015, Dari target yang telah ditetapkan sebesar 10% sehingga capaian kinerjanya itu sebesar $15,36/10*100 = 153,60\%$ dengan Kategori Sangat Baik (SB)

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus : } &= \frac{\text{Pendapatan Daerah 2016} - \text{Pendapatan Daerah 2015}}{\text{Pendapatan Daerah 2015}} \times 100\% \\
 &= \frac{27.694.035.120.859,00 - 24.240.445.765.650,00}{24.240.445.765.650,00} \times 100\% \\
 &= 15.36\%
 \end{aligned}$$

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp, 27,964,035,120,859,00 dikurangi dana boss/DAK Tahun 2016 sebesar Rp, 7,596,342,335,570,00 menjadi sebesar Rp, 20,367,692,785,289,00, sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yaitu Rp, 17,042,895,113,672,00 dengan demikian Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS/DAK) terealisasi sebesar 83,68% dari Target sebesar 84%: Capaiannya realisasi terhadap target yaitu $= 83,68/84,00 \times 100\%$ sebesar 99,61% dengan kategori Baik (B)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Pendapatan Daerah} - \sum \text{DAK}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{17.042.895.113.672,00}{27.694.035.120.859,00 - 7.596.342.335.570,00} \times 100\% \\
 &= \mathbf{84,80\%}
 \end{aligned}$$

Tabel 3,2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Terdatanya Potensi Pajak dan Bukan Pajak Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Jumlah Potensi Wajib Pajak	%	100	100,03	100,03	118,74
	c. Pajak Kendaraan Bermotor	kbm	16,000,000	16,085,121	100,53	87,20
	d. Pajak Air Permukaan	wp	785	785	100	205,26
	e. Pajak Bahan Bakar	Wapu	24	24	100	110,53
2	Jumlah Wajib Retribusi	wr	150	159	106,00	133,06
3	Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah (PAD non pajak & retribusi, dana perimbangan, lain-lain pendapatan sah)	objek	35	36	102,86	106,45

Jumlah Potensi Wajib Pajak Tahun 2016 terdiri dari :

NO	URAIAN	POTENSI			JUMLAH	
		FUNGSI				
		PRIBADI	DINAS	UMUM		
1	PKB					
	Sedan, Jeep, Station Wagon	1,689,683	19,222	85,844	1,794,749	
	Bus, Mikro Bus	7,964	1,362	19,890	29,216	
	Truck, Pick Up	473,559	6,607	55,342	535,508	

NO	URAIAN	POTENSI			JUMLAH	
		FUNGSI				
		Pribadi	Dinas	Umum		
	Alat Berat	43	4	10	57	
	Sepeda Motor, Scooter	13,651,362	74,228	1	13,725,591	
	Jumlah Potensi PKB	15,822,611	101,423	161,087	16,085,121	
3	Jumlah Potensi Aper				785	
4	Pajak Bahan Bakar KB				24	
	1. PT, AKR CORPORINDO Tbk 2. PT, PETRONAS NIAGA INDONESIA 3. PT, SHELL INDONESIA 4. PT, BARIA BULK TERMINAL 5. PT, PERTAMINA PATRANIAGA 6. PT, SOLAR PREMIUM CENTRAL 7. PT, APEX INDOPACIFIC 8. PT, JASATAMA PETROINDO 9. PT, INTI LINGGA SEJAHTERA 10. PT, PERTAMINA (PERSERO) 11. PT, TOTAL OIL INDONESIA 12. PT, ELNUSA PETROFIN 13. PT, PETRO ENERGY 14. PT, NIPPON OIL INDONESIA 15. PT, ROULINA ENERGI 16. PT, PUTRA PERSADA PERMATA PRIMA PERKASA 17. PT, PRO ENERGI 18. PT, PETROLIN NIAGA ENERGI 19. PT, PUTRA NAGA SAGARA 20. PT, PATRA BUANA PUTRA 21. PT, ELMINDO CIPTA PERSADA 22. PT, PUNINAR MITRA ABADI 23. PT, TELEINDO PRAKARSA 24. PT, ABETA CAHAYA GEMILANG					

Berdasarkan diatas didapatkan rata pencapaian Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{100,53 + 100 + 100}{3} \times 100\% \\
 &= 100,18
 \end{aligned}$$

sehingga capaiannya adalah 100,18% dengan kategori **Sangat Baik (SB)**

Potensi Wajib Retribusi untuk Tahun 2016 terealisasi sebanyak 159 WR dari target sebanyak 150 WR sehingga capaian kinerjanya adalah $159/150 \times 100\% = 106\%$,

Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah (PAD non pajak & retribusi, dana perimbangan, lain-lain pendapatan sah) dari target sebanyak 35 jenis

penerimaan dapat terealisasi sebanyak 36 jenis objek penerimaan sehingga capaiannya adalah 102,86% dengan kategori **Sangat Baik (SB)**

Tabel 3,3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Potensi wajib pajak yang terpungut	%	75	86,51	115,35	136,52
2	Potensi wajib retribusi yang terpungut	%	85	124,21	146,13	165,76
3	Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan	%	100	104,93	104,93	127,72

Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut yang terdiri dari dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	POTENSI			REALISASI			Capaian Efektifitas Pemungutan	
		FUNGSI		JUMLAH	FUNGSI		JUMLAH		
		PRIBADI	DINAS		PRIBADI	DINAS			
1	PKB								
	SEDAN, JEEP, STATION WAGON	1.689.683	19.222	85.844	1.794.749	1.471.455	15.847	61.501	
	BUS, MIKRO BUS	7.964	1.362	19.890	29.216	6.996	1.056	14.858	
	TRUCK, PICK UP	473.559	6.607	55.342	535.508	353.711	4.741	43.243	
	ALAT BERAT	43	4	10	57	30	4	10	
	SEPEDA MOTOR, SCOOTER	13.651.362	74.228	1	13.725.591	8.224.928	48.118	-	
	JUMLAH PKB	15.822.611	101.423	161.087	16.085.121	10.057.120	69.766	119.612	
2	APER	785			785			100	
3	PAJAK BAHAN BAKAR KB	24			23			95,83	
		RATA - RATA CAPAIAN = (63,7 + 100 + 95,83) / 3						86,51	

Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut dari target 88% dari potensi yang ada (150 WR) yaitu sebesar 128 WR dapat terealisasi sebesar 159 WR sehingga realisasinya sebesar $159/128 \times 100\% = 124,21\%$, dengan demikian maka capaian kinerjanya adalah = $124,21/85 \times 100 = 146,13\%$ (SB)

Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima yaitu dari pungutan diluar pajak dan retribusi terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah,

Penerimaan	Target	Realisasi	%
Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	334,653,250,208,00	322,402,263,906,00	96,34
Lain – Lain PAD yang Sah	848,871,792,031,00	919,504,521,579,00	108,32
Jumlah	1,183,525,042,239	1,241,906,785,485	104,93

Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima yaitu dari pungutan diluar pajak dan retribusi terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah dari target pencapaian sebesar 100 dapat terealisasi sebesar 104,93% dengan demikian capaian kinerjanya adalah $104,93/100 \times 100\% = 104,93\%$ kategori **Sangat Baik (SB)**,

Tabel 3,4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya kualitas SDM

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	%	36,9	39,00	112,50	107,45
		%	17,7	21,00	106,00	100,86
		%			119,00	114,04
2	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	77,00	126,68	164,52	107,12
3	Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	%	11	17,82	162,00	65,63

Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kelompok Pendidikan sampai dengan Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

SD	: 15 orang
SMP	: 14 orang
SMA	: 296 orang
Sarjana Muda	: 32 orang
Strata 1	: 342 orang
Strata 2	: 182 orang
Jumlah	881 orang

Proporsi Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan Formal S1 sampai dengan Tahun 2016 yaitu :

$$= \frac{\sum \text{Aparatur S-1}}{\sum \text{Karyawan Dispenda} \quad 2015} \times 100\%$$

$$= \frac{342}{881} \times 100\% = 39,00\%$$

Proporsi Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan Formal S2 sampai dengan Tahun 2016 yaitu :

$$= \frac{\sum \text{Aparatur S-2}}{\sum \text{Pegawai Dispenda} \quad 2016} \times 100\%$$

$$= \frac{182}{881} \times 100\% = 21.00\%$$

Proporsi Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan Teknis Subtantif yaitu sebanyak sampai dengan Tahun 2016 jika diasumsikan perhitungannya dari Tahun Anggaran 2013- 2015 yaitu sebagai berikut:

No,	Nama Pendidikan Teknis Substantif	Jumlah Peserta (orang)		
		2014	2015	2016
1.	Bintek Pengelolaan Sistem Kearsipan	72	70	70
2.	Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	72	70	-
3.	Bintek Pengelolaan Barang Daerah	72	70	70
4.	Bintek Pengelolaan Barang dan Jasa	50	70	70
5.	Bintek Aplikasi Samsat	50	70	70
6.	Bintek Perhitungan Pajak Daerah	-	70	70
7.	Bintek Penyelidikan dan Penyidikan Pajak Daerah bagi PPNS			30
	Jumlah Tahun	316	420	380
	Jumlah sampai dengan tahun 2015			1,116

Sehingga realisasi yang tercapai yaitu sebesar :

$$= \frac{\sum \text{Peserta Bintek sd TA 2016}}{\sum \text{Pegawai Dispenda} \quad 2016} \times 100\%$$

$$= \frac{1.116}{881} \times 100\% = 126.68\%$$

Sehingga capaian kinerjanya adalah $126,68/77 *100\% = 165,00$ dengan kategori **Sangat Baik (SB)**

Proporsi Aparatur Yang Telah Memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi yaitu sebagai berikut :

No,	Sertifikat Kompetensi Profesi	Jumlah Peserta (orang)		
		2014	2015	2016
1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	29	-	-
2	Auditor	4	2	5
3	Perawat Gigi	-	1	-
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	26	-	3
5	Akuntansi	10	-	-
6	Perpajakan	10	-	-
7	Kearsipan	-	1	-
8	Penyusun Renstra SKPD	-	2	-
9	Sertifikasi Jaringan Komputer	-	4	-
10	Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP)	-	-	1
11	Penatausahaan Keuangan	-	-	2
12	Diklat Bidang Pendapatan	-	-	30
13	Diklat Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	6
14	Diklat Administrasi Kepegawaian	-	-	2
15	Diklat Teknis Manajemen Kearsiapan	-	-	3
16	Diklat Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Accrual	-	-	16
	Jumlah Tahun	79	10	68
	Jumlah sampai dengan Tahun			157

Sehingga realisasi yang tercapai yaitu sebesar :

$$= \frac{\sum \text{Peserta Sertifikat Kompetensi Profesi sd TA 2016}}{\sum \text{Pegawai Dispenda 2016}} \times 100\%$$

$$= \frac{157}{881} \times 100\% = 17.82 \%$$

Sehingga capaian kinerjanya adalah $17,82/11 *100\% = 162,00\%$ dengan kategori **Sangat Baik (SB)**

Tabel 3,5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,5	82,69	100,23	99,53

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator sasaran berada di atas angka 100% yaitu sebesar 100,23% sudah melampaui target yang diharapkan yaitu sebesar 82,5% terjadi peningkatan sebesar jika dibandingkan dengan tahun 2015 ada sedikit peningkatan sebesar 0,7 point, Dispenda Provinsi Jawa Barat akan terus menerus melakukan peningkatan kualitas pelayanan, baik peningkatan sarana prasarana pendukung, pengembangan jenis layanan yang ditawarkan kepada wajib pajak, serta pengembangan infrastruktur strategis yang berkelanjutan sehingga untuk kenyamanan dan peningkatan pelayanan lebih representatif,

Tabel 3,6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6

Meningkatnya Ketersediaan Sarana, Prasarana Dan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik Yang Menopang Pengelolaan

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran	Sentra Layanan/ Jumlah Wajib Pajak	1:400	1:188	212,77	128,75
3	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur	%	90	100	111,12	100
4	Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	%	90	90	100	100

Jumlah wajib pajak yang terealisasi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 10,246,498 kbm yang dilayani oleh 179 sentra layanan yang ada di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yaitu :

No,	Lokasi Pelayanan	\sum Titik Pelayanan	\sum Hari Kerja dalam setahun
1.	Samsat Induk	34 lokasi	294 hari
2.	Samsat Oulet	16 lokasi	346 hari
3.	Samsat KCP BJB	30 lokasi	342 hari
4.	Samsat Drive Thru	2 lokasi	294 hari
5.	Samsat Keliling	14 lokasi	242 hari
6.	Samsat Gendong	78 lokasi	242 hari
7.	E-Samsat	5 Bank	365 hari
	Jumlah	179 Lokasi	
	Rata-rata pelayanan/tahun		303 hari

Realisasi Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pada tahun 2016 yaitu sebanyak 10,246,498 kbm yang dilayani oleh 179 lokasi sentra pelayanan selama rata-rata 303 hari dalam setahun sehingga Persentasi rerata cakupan layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Realisasi kbm tahun 2016}}{\sum \text{sentra layanan}} \\
 &= \frac{\sum 10.246.498 \text{ kbm}}{\sum 179 \text{ sentra layanan}} = 58.551 \text{ kbm/tahun} \\
 &= \frac{57.243 \text{ kbm}}{305 \text{ hari}} = 188 / \text{hari}
 \end{aligned}$$

Dengan perhitungan diatas dapat diartikan bahwa rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja tahun anggaran 2016 adalah 1 sentra pelayanan dapat melayani 188 wajib pajak/hari sedangkan targetnya adalah 1:400 sehingga capaian kinerjanya adalah $400/188*100\% = 212,77,00\%$ dengan kategori sasaran **Sangat (B)**

Jumlah Kebutuhan SOP Tahun sampai dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 211 SOP sedangkan Target ketersediaan Standar Operasional Prosedur Tahun 2016 yaitu sebanyak 189 SOP atau 90% sedangnya realisasinya yaitu sebanyak 211 SOP atau (100%) sehingga Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan yaitu sebesar $= 100/90*100 = 111,12\%$ sasaran bermakna Sangat Baik (SB),

Target ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan tahun 2016 yaitu sebanyak 29 Standar Pelayanan atau (90%) dapat direalisasikan sebanyak 29 Standar Pelayanan dengan demikian Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan tercapai sebesar 100% dengan Kategori Baik (B),

Tabel 3,7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7

Meningkatnya Modernisasi Informasi Layanan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	%	1,6	1,37	116,79	1,417
2	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	%	1,6	0,01	16000	111,11

Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI dapat dihitung dengan asumsi :

- 1 tahun = 346 hari (365 hari – 19 hari libur bersama)

2. 1 hari = 8 jam pelayanan

No,	Kantor	\sum Hari Kerja dalam setahun	\sum Titik Pelayanan	\sum Waktu Pelayanan	\sum Waktu Pelayanan Dalam setahun
1.	Samsat Induk	294 hari	34 lokasi	8 jam	79,968 jam
2.	Samsat Oulet	346 hari	16 lokasi	8 jam	44,288 jam
3.	Samsat KCP	250 hari	15 lokasi	8 jam	58,080 jam
4.	Samsat Drive Thru	298 hari	2 lokasi	8 jam	4,704 jam
5.	Samsat Keliling	346 hari	14 lokasi	8 jam	16,940 jam
6.	Samsat Gendong	250 hari	46 lokasi	8 jam	94,380 jam
7.	E-samsat	346 hari	1 lokasi	8 jam	8,760 jam
307,120 jam					

Total jam gangguan seluruh titik pelayanan dalam setahun : 4,224 jam

Total jam pelayanan seluruh titik pelayanan yaitu : 307,120 jam menit

Prosentase jam gangguan seluruh titik pelayanan dalam setahun yaitu : $4,224 / 307,120 \times 100\% = 1,37\%$ sehingga kinerja yang dicapai yaitu sebesar $1,6 / 1,37 \times 100\% = 116,79\%$

Rekap sebaran perangkat IT lingkup Dispensa Provinsi Jawa Barat

NO	JENIS PERANGKAT	JUMLAH PERANGKAT	JUMLAH GANGGUAN PERANGKAT
1	Thin Client	1,426	9
2	Printer OKI 1120	427	7
3	Printer OKI 395	501	4
4	Printer High Speed	42	0
5	UPS	102	3
6	Router	152	2
7	Switch Hub	199	5
		2,849	30

Jumlah Perangkat seluruhnya: **2,849**

Jumlah Gangguan dalam setahun : **30**

Persentase gangguan dalam setahun : $30 / 2,849 \times 100\% = 0,01\%$

Tabel 3,8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8

Meningkatnya Sinergitas Antar Institusi Pengelola Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	%	90			141,41

Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan terbagi dalam beberapa kegiatan yaitu :

No,	Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Target OPD	Realisasi OPD	Capaian
1.	Rapat Identifikasi	1	1	54	48	88,89
2.	Rakor PBBKB	1	1	27	24	88,89
3.	Rapat Teknis PBBKB	3	3	27	24	88,89
4.	Rakor Pajak Rokok	1	1	27	24	88,89
5.	Rapat Koordinasi DBHCHT	1	1	27	24	88,89
6.	Rapat Koordinasi PPH	1	1	27	24	88,89
7.	Rekonsiliasi PAD	4	4	27	22	100,00
8.	Workshop	0	1	1	1	100,00
9.	Focus Group Discussion	0	1	1	1	100,00
10.	Rapat pembahasan Target	5	5	10	10	100,00
11.	SBO	5	5	10	10	100,00
12.	Rakor Lifting Migas	4	1	27	27	100,00
13.	Lifting	4	4	5	5	100,00
14.	Rekon Dana Bagi Hasil	4	4	5	5	100,00
	Jumlah	31	33	270	240	1333,33
		Rata-Rata Capaian				95,25
		Target Renstra				90,00

Dengan demikian maka realisasi Prosentase Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan yaitu sebesar 95,25% sehingga bila dibandingkan dengan target 2016 makan Capaian Kinerja Tahun 2016 yaitu sebesar $95,25/90*100\% = 105,82\%$,

Tabel 3,9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9

Meningkatnya Ketepatan Dan Keakuratan Pelaporan Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1.	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	%	94	99,90	106,29	108,53
2.	Jumlah temuan SPI antar tahun	%	350	333	105,10	93,94
3.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	%	100	100	100	100
4.	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai	Point	81,5	81,96	100,57	93,94

Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) dapat dihitung dari table berikut ini :

NO	CABANG PELAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	AGT	OKT	NOV	DES	RATA-RATA
1	WIL DEPOK I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	WIL DEPOK II CINERE	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	98,96	98,96	99,48
3	WIL KAB,BOGOR CIBINONG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	WIL KOTA BOGOR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	WIL KOTA SUKABUMI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	WIL KAB, SKBMI I, CIBADAK	100,00	98,96	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,74
7	WIL KAB, SKBMI II, PEL, RATU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	WIL KAB, CIANJUR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	WIL KOTA BEKASI	98,96	98,96	98,96	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,65
10	WIL KAB, BEKASI - CIKARANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	98,96	99,83
11	WIL KAB, KARAWANG	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83
12	WIL KAB, PURWAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	WIL KAB, SUBANG	100,00	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	98,96	98,96	99,48
14	WIL KOTA CIREBON	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
15	WIL KAB, CIREBON I SUMBER	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	WIL KAB, CIREBON II CILEDUG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	WIL KAB, INDRAMAYU I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
18	WIL KAB, INDRAMAYU II HGLS	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
19	WIL KAB, KUNINGAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	99,91
20	WIL KAB, MAJALENGKA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	WIL KOTA BDG I PADJAJARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	WIL KOTA BDG II KAWALUYAAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	WIL KOTA BDG III S,HATTA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	WIL KAB, BANDUNG BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	100,00	98,96	99,74
25	WIL KAB, BANDUNG I RANCAEKEK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	WIL KAB, BANDUNG II SOREANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	WIL KAB, SUMEDANG	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	98,96	98,96	98,96	98,96	98,96	99,48

NO	CABANG PELAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	AGT	OKT	NOV	DES	RATA-RATA
28	WIL KAB, GARUT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
29	WIL KOTA TASIKMALAYA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	99,91
30	WIL KABUPATEN TASIKMALAYA SKRJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83
31	WIL KAB, CIAMIS I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	WIL KAB, CIAMIS II PGNDARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	WIL KOTA CIMAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	WIL KOTA BANJAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
														Nilai Rata-Rata
														99,90

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) dari target yang ditetapkan sebesar 94% tercapai sebesar 99,90 maka pencapaian kinerjanya adalah sebesar = $99,90/94 * 100\% = 106,29$ dengan Kategori Sangat Baik (SB)

Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	CPDP	JUMLAH TEMUAN 2016	JUMLAH TEMUAN 2016
1	Kota Depok I	7	7
2	Kota Depok II Cinere	14	14
3	Kabupaten Bogor	10	10
4	Kota Bogor	8	8
5	Kota Sukabumi	6	6
6	Kab, Sukabumi I Cibadak	6	6
7	Kab, Sukabumi II Pelabuhanratu	20	20
8	Kabupaten Cianjur	15	15
9	Kota Bekasi	14	14
10	kabupaten Bekasi	11	11
11	Kabupaten Karawang	7	7
12	Kabupaten Purwakarta	9	9
13	Kabupaten Subang	11	11
14	Kota Cirebon	12	12
15	Kab, Cirebon I Sumber	5	5
16	Kab, Cirebon II Ciledug	16	16
17	Kab, Indramayu I	9	9
18	Kab, Indramayu II Haurgeulis	13	13
19	Kabupaten Kuningan	6	6
20	kabupaten Majalengka	9	9
21	Kota Bandung I Pajajaran	4	4
22	Kota Bandung II Kawaluyaan	31	31
23	Kota Bandung III Soekarno-Hatta	5	5
24	Kabupaten Bandung Barat	8	8
25	Kab, Bandung I Rancaekek	9	9
26	Kab, Bandung II Soreang	10	10
27	Kabupaten Sumedang	9	9

NO	CPDP	JUMLAH TEMUAN 2016	JUMLAH TEMUAN 2016
28	Kabupaten Garut	4	4
29	Kota Tasikmalaya	6	6
30	Kabupaten Tasikmalaya	5	5
31	Kabupaten Ciamis	8	8
32	Kabupaten Pangandaran	14	14
33	Kota Cimahi	6	20
34	Kota Banjar	12	12
	Jumlah	361	333

Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian Laporan Bulanan selama kurun waktu tahun 2016 tercapai sebesar 100% dengan rincian terlampir

Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan yaitu :

1. Tindaklanjut hasil pemeriksaan regular Inspektorat Provinsi Jawa Barat terdapat 14 (empat belas) temuan, 22 (dua puluh dua) saran dan 22 (dua puluh dua) tindaklanjut sehingga telah selesai 100%,
2. Tindaklanjut hasil pemeriksaan regular Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terdapat 13 (tiga belas) temuan, 26 (dua puluh enam) buah Rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 26, sehingga telah selesai 100%

Dari hasil rekapitulasi di atas didapatkan realisasi Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan yaitu $(100\%+100\%) /2 = 100\%$, sehingga capaian kinerjanya itu $100/100*100\% = 100\%$

Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 yaitu sebesar 81,96 Kategori Sangat Baik (A)

3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD

Tahun 2018

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TERHADAP RPJMD 2018
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1.	Proposi kenaikan pendapatan Daerah antar tahun anggaran	40,24	50	80,48
		2.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)	84,3	84	100,36
2	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	3.	Jumlah potensi wajib pajak, a. Pajak Kendaraan Bermotor	16,085,121 785	18,4juta 785	87,42 100

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TERHADAP RPJMD 2018
			b. Pajak Air Permukaan c. Pajak Bahan Bakar	24	28	85,71
		4.	Jumlah Wajib Retribusi	159	170	93,53
		5.	Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	36	35	102,86
3,	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	6.	Proporsi potensi wajib pajak/wajib pungut yang terpungut	86,51	75	115,346
		7.	Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut	124,21	90	138,01
		8.	Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima	104,93	100	104,93
4,	Meningkatnya kualitas Aparatur	9.	proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	39 21	35,2 19,2	110,79 109,38
		10.	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substanstif	126,68	79	160,35
		11.	Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi Profesi	17,82	13	137,08
5,	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	12.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,69	82,8	99,86
6,	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	13.	Prosentasi rerata cakupan layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	1:188	1:200	106,38
		14.	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	111,12	100	111,12
		15.	Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	100	100	100
7,	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	16.	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	1,37	1,2	87,59
		17.	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	0,01	1,2	12,000

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TERHADAP RPJMD 2018
8,	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	18.	Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan		75	
9,	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	19.	Tingkat deviasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan			
		20.	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	99,90	96	104,06
		21.	Jumlah temuan SPI antar tahun	333	250	75,07
		22.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	100	100	100
		23.	Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai,	81,96	82,5	99,35

3.5 Realisasi Anggaran

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1		2		3		4		5	6
1	20	05	29		Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	641,773,572,00	546,343,572,00	428,872,840,00	78,50
1	20	05	29	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	641,773,572,00	546,343,572,00	428,872,840,00	78,50
1	20	05	53		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,141,250,000,00	979,947,500,00	963,567,200,00	98,33
1	20	05	53	01	Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	184,300,000,00	184,300,000,00	184,020,000,00	99,85
1	20	05	53	02	Tatanan Teknis Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat	95,500,000,00	95,500,000,00	95,488,000,00	99,99
1	20	05	53	03	Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar	90,750,000,00	90,750,000,00	88,886,500,00	97,95
1	20	05	53	06	Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jawa Barat	356,600,000,00	337,847,500,00	335,847,500,00	99,41
1	20	05	53	07	Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar	90,750,000,00	90,750,000,00	87,525,200,00	96,45

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	05	53	08	Penyusunan Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor E Samsat Via ATM	180,800,000,00	180,800,000,00	171,800,000,00	95,02
1	20	05	57		Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	37,338,554,000,00	34,075,648,450,00	27,290,541,921,00	80,09
1	20	05	57	01	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	910,096,700,00	528,001,700,00	489,044,700,00	92,62
1	20	05	57	02	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	628,008,650,00	414,893,650,00	397,470,000,00	95,80
1	20	05	57	03	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	2,061,746,000,00	1,700,860,000,00	1,044,715,800,00	61,42
1	20	05	57	04	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	828,115,900,00	666,645,900,00	630,343,250,00	94,55
1	20	05	57	05	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	539,719,800,00	515,884,800,00	509,017,800,00	98,67
1	20	05	57	06	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas	1,224,219,650,00	1,211,529,650,00	921,286,750,00	76,04

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak				
1	20	05	57	07	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	945,081,350,00	853,711,350,00	665,296,300,00	77,93
1	20	05	57	08	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	1,361,468,000,00	1,439,667,000,00	1,061,753,000,00	73,75
1	20	05	57	09	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1,603,928,850,00	831,708,850,00	790,697,850,00	95,07
1	20	05	57	10	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	2,080,722,750,00	1,248,534,200,00	997,354,048,00	79,88
1	20	05	57	11	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1,419,140,600,00	1,311,525,600,00	947,925,550,00	72,28
1	20	05	57	12	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	1,214,568,200,00	1,131,688,200,00	993,119,000,00	87,76

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	05	57	13	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	1,346,671,050,00	1,445,356,050,00	1,303,174,800,00	90,16
1	20	05	57	14	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	452,191,000,00	396,446,000,00	383,579,400,00	96,75
1	20	05	57	15	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	1,344,767,900,00	1,336,182,900,00	1,148,237,500,00	85,93
1	20	05	57	16	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1,143,665,650,00	1,170,940,650,00	1,032,986,850,00	88,22
1	20	05	57	17	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1,272,335,650,00	1,323,500,650,00	747,990,900,00	56,52
1	20	05	57	18	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	707,736,300,00	717,386,300,00	624,989,000,00	87,12

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	05	57	19	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	1,491,435,850,00	1,516,665,850,00	1,139,366,700,00	75,12
1	20	05	57	20	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1,459,559,850,00	1,510,294,850,00	972,755,000,00	64,41
1	20	05	57	21	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	940,132,200,00	742,427,200,00	557,134,410,00	75,04
1	20	05	57	22	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	975,146,750,00	782,451,750,00	674,356,200,00	86,19
1	20	05	57	23	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	886,566,600,00	732,291,600,00	680,724,888,00	92,96
1	20	05	57	24	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	988,469,600,00	883,136,600,00	777,340,800,00	88,02
1	20	05	57	25	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas	1,110,360,900,00	1,064,810,900,00	930,865,400,00	87,42

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek				
1	20	05	57	26	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1,028,636,000,00	929,334,000,00	787,794,500,00	84,77
1	20	05	57	27	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1,251,331,350,00	1,291,624,850,00	1,116,821,650,00	86,47
1	20	05	57	28	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1,398,737,300,00	1,505,693,800,00	1,077,194,550,00	71,54
1	20	05	57	29	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	688,610,300,00	632,650,300,00	467,883,050,00	73,96
1	20	05	57	30	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1,266,750,350,00	1,434,785,350,00	1,061,799,500,00	74,00
1	20	05	57	31	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	1,112,893,400,00	1,210,543,400,00	1,001,968,400,00	82,77

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	05	57	32	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	690,180,000,00	736,990,000,00	592,579,000,00	80,41
1	20	05	57	33	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	503,800,500,00	398,440,500,00	357,412,200,00	89,70
1	20	05	57	34	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	461,759,050,00	459,044,050,00	405,563,175,00	88,35
1	20	05	58		Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	183,000,000,00	393,300,000,00	342,904,900,00	87,19
1	20	05	58	01	Bimbingan Teknis Aparatur di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	183,000,000,00	393,300,000,00	342,904,900,00	87,19
1	20	05	59		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,380,520,000,00	3,324,598,000,00	3,123,637,227,00	93,96
1	20	05	59	01	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dipenda Provinsi Jawa Barat	757,650,000,00	757,650,000,00	682,277,930,00	90,05
1	20	5	59	02	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Depok I	67,100,000,00	67,100,000,00	61,985,000,00	92,38

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	5	59	03	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Depok II Cinere	68,050,000,00	68,050,000,00	67,000,000,00	98,46
1	20	5	59	03	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	94,850,000,00	56,875,000,00	50,977,500,00	89,63
1	20	5	59	05	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bogor	64,050,000,00	64,050,000,00	58,884,000,00	91,93
1	20	5	59	06	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	60,660,000,00	60,660,000,00	55,710,000,00	91,84
1	20	5	59	07	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	70,050,000,00	70,050,000,00	65,065,000,00	92,88
1	20	5	59	08	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	57,950,000,00	57,950,000,00	56,456,000,00	97,42
	20	5	59	09	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang	62,000,000,00	62,000,000,00	57,017,440,00	91,96

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur				
1	20	5	59	10	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bekasi	103,600,000,00	101,040,000,00	100,720,000,00	99,68
1	20	5	59	11	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	89,850,000,00	89,850,000,00	83,543,500,00	92,98
1	20	5	59	12	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	73,200,000,00	71,970,000,00	67,152,428,00	93,31
1	20	5	59	13	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	78,100,000,00	76,670,000,00	76,670,000,00	100,00
1	20	5	59	14	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	61,000,000,00	61,000,000,00	60,600,000,00	99,34
1	20	5	59	15	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Cirebon	77,700,000,00	77,700,000,00	72,435,000,00	93,22
1	20	5	59	16	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang	74,650,000,00	74,650,000,00	69,340,000,00	92,89

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber				
1	20	5	59	17	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	54,900,000,00	54,900,000,00	44,308,125,00	80,71
1	20	5	59	18	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	61,000,000,00	61,000,000,00	59,400,000,00	97,38
1	20	5	59	19	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	73,350,000,00	73,350,000,00	71,057,500,00	96,87
1	20	5	59	20	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	59,850,000,00	59,850,000,00	53,695,000,00	89,72
1	20	5	59	21	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	69,950,000,00	69,950,000,00	67,200,000,00	96,07
1	20	5	59	22	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang	99,100,000,00	96,800,000,00	95,840,000,00	99,01

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran				
1	20	5	59	23	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	85,400,000,00	85,400,000,00	83,860,000,00	98,20
1	20	5	59	24	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	94,550,000,00	94,550,000,00	87,391,400,00	92,43
1	20	5	59	25	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	118,450,000,00	129,000,000,00	123,872,000,00	96,02
1	20	5	59	26	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	100,450,000,00	100,450,000,00	96,095,000,00	95,66
	20	5	59	27	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	103,700,000,00	100,738,000,00	98,797,000,00	98,07
1	20	5	59	28	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang	73,200,000,00	70,920,000,00	65,504,400,00	92,36

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang				
1	20	5	59	29	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	100,250,000,00	97,750,000,00	85,746,180,00	87,72
1	20	5	59	30	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	67,000,000,00	65,100,000,00	64,620,000,00	99,26
1	20	5	59	31	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	57,950,000,00	56,145,000,00	55,860,000,00	99,49
1	20	5	59	32	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I	71,310,000,00	65,010,000,00	65,010,000,00	100,00
1	20	5	59	33	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran	56,150,000,00	54,535,000,00	50,599,824,00	92,78
y	20	5	59	34	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cimahi	64,050,000,00	64,050,000,00	62,370,000,00	97,38

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	5	59	35	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Banjar	51,850,000,00	50,235,000,00	50,065,000,00	99,66
1	20	5	59	36	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	57,600,000,00	57,600,000,00	56,512,000,00	98,11
1	20	05	60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	62,725,620,231,00	66,370,878,979,00	60,242,869,934,00	90,77
1	20	05	60	01	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	37,672,249,218,00	40,873,200,000,00	36,122,111,322,00	88,38
1	20	05	60	02	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Depok I	1,215,070,312,00	1,148,261,644,00	1,099,342,379,00	95,74
1	20	05	60	03	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Depok II Cinere	561,050,000,00	576,050,000,00	554,878,907,00	96,32
1	20	05	60	04	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	874,155,300,00	880,635,250,00	859,945,641,00	97,65
1	20	05	60	05	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bogor	705,333,312,00	714,481,262,00	692,670,490,00	96,95

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	05	60	06	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	600,822,856,00	609,900,856,00	591,143,300,00	96,92
1	20	05	60	07	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	532,101,281,00	545,185,605,00	521,137,000,00	95,59
1	20	05	60	08	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	454,223,856,00	489,507,500,00	464,570,117,00	94,91
1	20	05	60	09	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	677,079,800,00	684,180,400,00	643,359,299,00	94,03
1	20	05	60	10	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bekasi	999,055,312,00	998,047,550,00	965,462,540,00	96,74
1	20	05	60	11	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	981,264,000,00	985,332,900,00	958,183,555,00	97,24
1	20	05	60	12	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan	1,254,600,000,00	1,720,964,000,00	1,601,274,333,00	93,05

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang				
1	20	05	60	13	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	563,125,000,00	571,149,300,00	556,880,776,00	97,50
1	20	05	60	14	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	380,960,000,00	526,760,000,00	521,160,361,00	98,94
1	20	05	60	15	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cirebon	785,560,000,00	750,453,000,00	689,655,007,00	91,90
1	20	05	60	16	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumber	601,060,800,00	607,582,650,00	586,282,053,00	96,49
1	20	05	60	17	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	388,245,000,00	384,495,000,00	362,786,875,00	94,35
1	20	05	60	18	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Indramayu I	690,120,000,00	697,095,000,00	662,899,974,00	95,09
1	20	05	60	19	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan	1,338,276,856,00	1,240,300,000,00	1,180,461,960,00	95,18

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis				
1	20	05	60	20	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	684,220,000,00	647,675,200,00	559,723,789,00	86,42
1	20	05	60	21	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	834,679,856,00	842,585,400,00	727,493,026,00	86,34
1	20	05	60	22	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1,282,750,000,00	1,254,024,400,00	1,186,589,165,00	94,62
1	20	05	60	23	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	741,083,312,00	736,383,263,00	682,134,479,00	92,63
1	20	05	60	24	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	558,472,856,00	539,518,100,00	530,565,866,00	98,34
1	20	05	60	25	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	319,930,000,00	326,655,000,00	325,354,333,00	99,60
1	20	05	60	26	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan	494,235,856,00	498,933,300,00	485,767,320,00	97,36

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Dispenda Provinsi Wilayah Bandung I Rancaekek				
1	20	05	60	27	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	782,040,000,00	780,273,000,00	713,650,100,00	91,46
1	20	05	60	28	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	413,325,000,00	421,821,488,00	397,345,388,00	94,20
1	20	05	60	29	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	536,837,856,00	529,530,856,00	492,040,233,00	92,92
1	20	05	60	30	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	527,511,856,00	547,511,856,00	519,017,607,00	94,80
1	20	05	60	31	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	608,433,312,00	573,373,312,00	559,069,000,00	97,51
1	20	05	60	32	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	577,290,856,00	578,511,583,00	544,250,583,00	94,08
1	20	05	60	33	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan	501,740,856,00	516,740,856,00	508,877,650,00	98,48

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran				
1	20	05	60	34	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Cimahi	368,189,856,00	363,700,011,00	355,976,635,00	97,88
1	20	05	60	35	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Banjar	588,441,856,00	569,141,912,00	563,284,912,00	98,97
1	20	05	60	36	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	1,632,084,000,00	1,640,917,525,00	1,457,523,959,00	88,82
1	20	06	61		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	248,013,702,245,00	206,494,871,416,01	166,481,890,114,00	80,62
1	20	5	61	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	23,186,270,000,00	34,793,099,000,00	29,242,169,476,00	84,05
1	20	05	61	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	825,403,000,00	1,112,163,625,00	1,101,206,868,00	99,01
1	20	05	61	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	1,031,508,000,00	1,548,208,450,00	1,525,668,420,00	98,54

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	05	54	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	527,952,000,00	772,913,216,00	724,849,566,00	93,78
1	20	05	61	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1,757,672,700,00	2,114,378,872,00	1,996,300,171,00	94,42
1	20	05	61	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	202,000,000,00	482,969,100,00	437,610,000,00	90,61
1	20	05	61	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	2,016,743,000,00	2,815,179,137,00	2,436,966,077,00	86,57
1	20	05	61	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	1,101,661,000,00	2,058,104,900,00	1,960,101,780,00	95,24
1	20	05	61	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	459,398,000,00	468,398,000,00	457,033,187,00	97,57
1	20	05	61	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas	250,550,000,00	542,554,450,00	505,830,000,00	93,23

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta				
1	20	05	61	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	401,150,000,00	774,385,738,00	725,497,788,00	93,69
1	20	05	61	12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	991,138,600,00	1,114,808,450,00	1,046,314,591,00	93,86
1	20	05	61	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	819,612,000,00	773,900,078,28	764,776,727,00	98,82
1	20	05	61	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1,363,780,000,00	1,912,168,582,00	1,675,939,600,00	87,65
1	20	05	61	15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1,933,840,000,00	2,323,065,950,00	2,156,163,850,00	92,82
1	20	05	61	16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	3,344,588,000,00	3,918,744,996,00	3,570,894,653,00	91,12

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	05	61	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	9,955,711,600,00	10,197,861,100,00	8,914,193,700,00	87,41
1	20	05	61	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	943,870,000,00	1,245,461,450,00	1,201,312,375,00	96,46
1	20	05	61	19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	776,570,278,00	1,265,853,978,00	1,207,213,835,00	95,37
1	20	05	61	20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	812,215,000,00	1,095,942,240,00	1,070,312,483,00	97,66
1	20	05	61	21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	749,800,000,00	993,505,950,00	974,790,000,00	98,12
1	20	05	61	22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten I Rancaekek	1,002,493,000,00	1,285,713,700,00	1,237,625,750,00	96,26
1	20	05	61	23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas	836,582,500,00	1,502,870,500,00	1,376,706,560,00	91,61

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung II Soreang				
1	20	05	61	24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	540,073,000,00	702,009,794,83	679,163,858,00	96,75
1	20	05	61	25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	525,500,000,00	1,009,301,732,00	957,022,785,00	94,82
1	20	05	61	26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	352,112,000,00	882,919,150,00	809,445,450,00	91,68
1	20	05	61	27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1,729,070,800,00	2,012,169,900,00	1,899,197,100,00	94,39
1	20	05	61	28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	354,600,000,00	1,076,259,950,00	983,057,200,00	91,34
1	20	05	61	29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	496,492,000,00	795,587,950,00	771,224,405,00	96,94
1	20	05	61	30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas	553,526,000,00	894,173,157,00	877,215,806,00	98,10

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi				
1	20	05	61	31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	1,094,741,000,00	1,125,595,008,66	730,758,666,00	64,92
1	20	05	61	32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	3,793,490,000,00	3,424,297,000,00	2,776,303,016,00	81,08
1	20	05	61	33	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	40,566,569,513,00	22,859,803,701,00	14,723,133,572,00	64,41
1	20	05	61	34	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	27,236,977,601,00	24,536,332,700,00	22,316,166,438,00	90,95
1	20	05	61	35	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	12,572,450,000,00	12,170,125,000,00	11,968,416,092,00	98,34
1	20	05	61	36	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten karawang	33,696,125,859,00	12,573,094,101,00	1,046,976,300,00	8,33

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	05	61	37	Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	12,679,917,789,00	12,438,431,105,00	10,666,694,300,00	85,76
1	20	05	61	38	Pembangunan Gedung Mess dan Aula Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di CPDP Wilayah Kota Cimahi	14,235,126,000,00	14,235,126,000,00	10,913,840,032,00	76,67
1	20	05	61	39	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	24,956,778,417,00	20,082,353,187,00	17,638,206,850,00	87,83
1	20	05	61	40	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	17,339,643,588,00	565,040,517,24	415,590,787,00	73,55
1	20	05	62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	46,288,262,906,00	51,496,727,378,00	47,675,430,598,00	92,58
1	20	05	62	01	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dispenda Provinsi Jawa Barat	12,348,767,541,00	15,638,411,589,00	14,281,622,785,00	91,32
1	20	05	62	02	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Depok I	731,265,000,00	737,439,400,00	718,309,331,00	97,41
1	20	05	62	03	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang	835,398,000,00	861,005,108,00	832,358,659,00	96,67

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Depok II Cinere				
1	20	05	62	04	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	1,091,560,725,00	1,115,835,672,00	1,081,691,012,00	96,94
1	20	05	62	05	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bogor	788,007,500,00	841,093,268,00	815,144,020,00	96,91
1	20	5	62	06	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	1,171,555,000,00	1,194,193,417,00	1,177,812,577,00	98,63
1	20	5	62	07	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	745,000,000,00	756,162,688,00	707,782,221,00	93,60
1	20	5	62	08	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	596,300,000,00	606,678,088,00	567,150,238,00	93,48
1	20	5	62	09	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	672,693,150,00	665,827,150,00	567,766,117,00	85,27

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	5	62	10	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1,414,968,000,00	1,348,982,450,00	1,291,056,843,00	95,71
1	20	5	62	11	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	839,573,000,00	851,372,704,00	764,156,780,00	89,76
1	20	5	62	12	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1,407,579,000,00	1,365,792,200,00	1,224,871,037,00	89,68
1	20	5	62	13	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	781,640,000,00	799,047,586,00	778,372,632,00	97,41
1	20	5	62	14	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	897,764,000,00	1,366,621,336,00	1,330,240,256,00	97,34
1	20	5	62	15	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Cirebon	1,164,794,000,00	1,124,673,500,00	1,093,301,193,00	97,21
1	20	5	62	16	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi	918,421,690,00	897,960,690,00	823,315,304,00	91,69

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber				
1	20	5	62	17	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	664,773,000,00	1,009,393,000,00	970,951,054,00	96,19
1	20	5	62	18	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1,057,257,000,00	945,186,350,00	743,871,875,00	78,70
1	20	5	62	19	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	687,339,000,00	685,376,354,00	619,374,012,00	90,37
1	20	5	62	20	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	774,568,000,00	713,169,400,00	592,255,783,00	83,05
1	20	5	62	21	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1,031,078,000,00	1,033,601,938,00	837,322,911,00	81,01
1	20	5	62	22	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1,251,550,000,00	1,267,965,240,00	1,197,587,441,00	94,45

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	5	62	23	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	1,179,296,000,00	1,292,851,240,00	1,228,098,661,00	94,99
1	20	5	62	24	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	947,976,800,00	1,072,678,708,00	1,008,069,021,00	93,98
1	20	5	62	25	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1,756,171,500,00	2,229,416,835,00	2,192,700,411,00	98,35
1	20	5	62	26	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	1,124,383,000,00	1,137,261,556,00	1,118,611,916,00	98,36
1	20	5	62	27	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1,039,989,000,00	1,061,338,570,00	943,559,889,00	88,90
1	20	5	62	28	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1,024,904,000,00	1,035,642,380,00	961,126,289,00	92,80

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	5	62	29	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1,212,090,000,00	1,185,277,914,00	1,098,606,734,00	92,69
1	20	5	62	30	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	711,453,000,00	728,893,750,00	712,997,900,00	97,82
1	20	5	62	31	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	599,850,000,00	613,875,974,00	613,346,816,00	99,91
1	20	5	62	32	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	1,489,657,000,00	1,485,942,443,00	1,353,826,840,00	91,11
1	20	5	62	33	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	723,417,000,00	1,167,861,100,00	1,039,486,613,00	89,01
1	20	5	62	34	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Cimahi	1,371,868,000,00	1,440,084,630,00	1,347,779,833,00	93,59
1	20	5	62	35	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispensa Provinsi Wilayah Kota Banjar	556,000,000,00	542,243,450,00	518,566,955,00	95,63

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	5	62	36	Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	679,356,000,00	677,569,700,00	522,338,639,00	77,09
1	20	05	65		Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	5,743,545,000,00	5,422,020,500,00	5,161,906,582,00	95,20
1	20	05	65	01	Penyusunan Aplikasi dan Dashboard Info Layanan Perencanaan Pendapatan dan Belanja	167,994,000,00	210,194,000,00	202,459,000,00	96,32
1	20	05	65	02	Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	718,575,000,00	718,575,000,00	714,347,350,00	99,41
1	20	05	65	03	Rapat Kerja Pendapatan Daerah	459,900,000,00	426,450,000,00	360,379,450,00	84,51
1	20	05	65	04	Sosialisasi, Monitoring dan Koordinasi Pajak Daerah	1,030,800,000,00	959,300,000,00	918,989,650,00	95,80
1	20	05	65	05	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II	440,166,000,00	420,650,000,00	410,237,929,00	97,52
1	20	05	65	06	Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber II	447,500,000,00	402,000,000,00	381,825,922,00	94,98
1	20	05	65	07	Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber I	325,000,000,00	325,000,000,00	317,789,015,00	97,78

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
1	20	05	65	08	Kajian Regulasi Pendapatan	248,600,000,00	199,500,000,00	190,692,266,00	95,59
1	20	05	65	09	Rapat Kerjasama Pendapatan Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi	253,100,000,00	253,100,000,00	244,693,282,00	96,68
1	20	05	65	10	Peningkatan kapasitas Penggalian Potensi Pendapatan Daerah	978,010,000,00	816,650,000,00	787,306,282,00	96,41
1	20	05	65	11	Kapita Selekta	178,350,000,00	178,171,500,00	173,951,500,00	97,63
1	20	05	65	12	Kajian Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah	145,550,000,00	164,050,000,00	117,314,856,00	71,51
1	20	05	65	13	Penyusunan SOP	150,000,000,00	150,000,000,00	147,284,551,00	98,19
1	20	05	65	14	Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 34 CPDP	200,000,000,00	198,380,000,00	194,635,529,00	98,11
1	20	05	66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	273,758,000,00	273,758,000,00	244,267,400,00	89,23
1	20	05	66	01	Penyusunan RKA 2017, DPA Tahun 2016, DPA Pergeseran dan DPPA Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	100,000,000,00	100,000,000,00	78,703,900,00	78,70
1	20	05	66	02		173,758,000,00	173,758,000,00	165,563,500,00	95,28

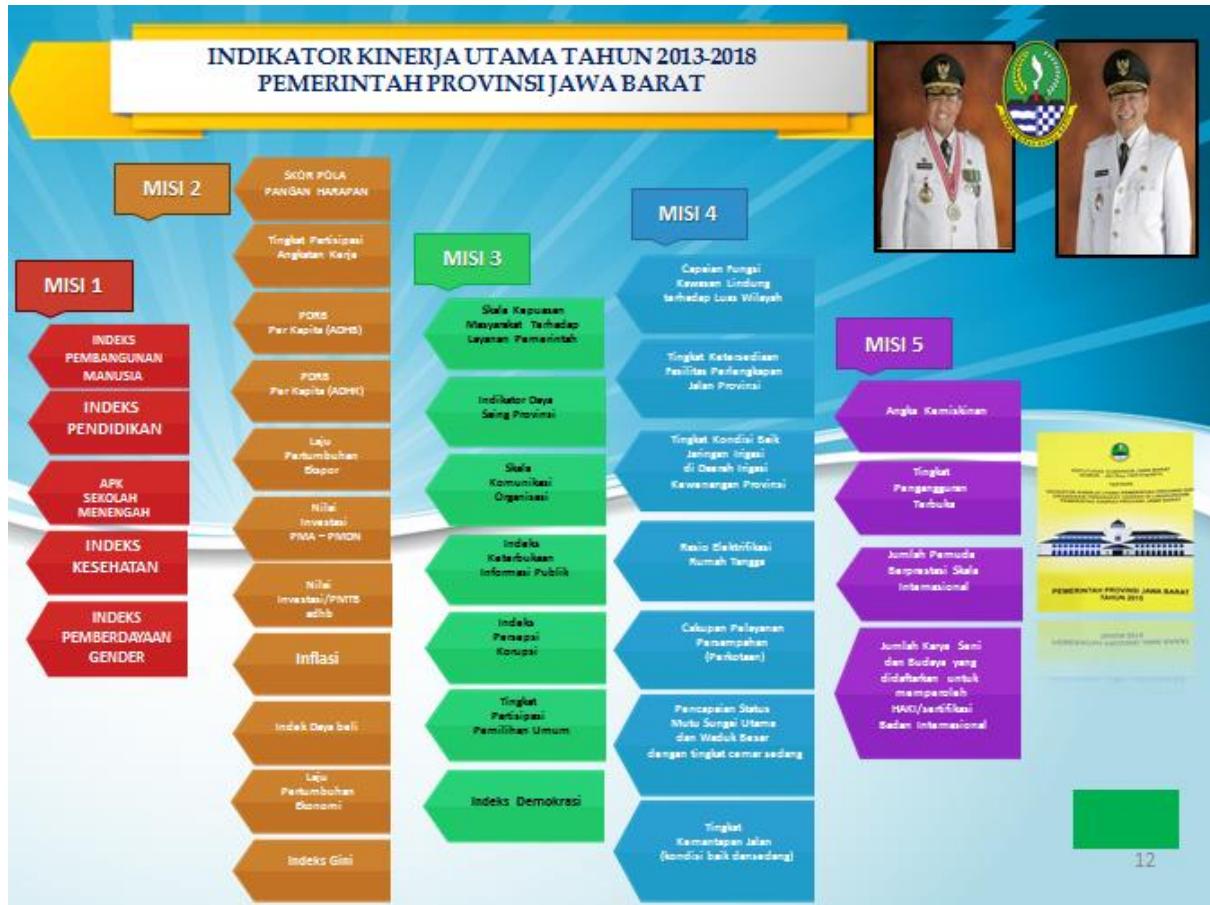
Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp.)	%
					Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat				
1	20	05	67		Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	1,225,474,500,00	1,317,754,500,00	1,240,251,452,00	94,12
1	20	05	67	01	Monitoring Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	100,000,000,00	100,000,000,00	91,369,300,00	91,37
1	20	05	67	01	Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dispenda Provinsi Jawa Barat	1,125,474,500,00	1,217,754,500,00	1,148,882,152,00	94,34
JUMLAH BELANJA LANGSUNG						406,955,460,454,00	370,695,848,295,01	313,196,140,168,00	84,49
Belanja Tidak Langsung						342,093,242,490,00	336,106,936,170,00	324,714,045,643,00	96,61
Belanja						749,048,702,944,00	706,802,784,465,01	637,910,185,811,00	90,25

3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No,	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pendapatan Daerah	153,60	89,87	10,13%
2	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah	Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	104,23	73,09	26,91%
3	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pendapatan Daerah	153,60	66,83	33,17%
4	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut	108,14	80,09	19,91%
6	Meningkatnya kualitas aparatur yang kompeten dan terpercaya	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S-1	105,69	92,40	7,60%
7	Meningkatnya kualitas aparatur yang kompeten dan terpercaya	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	164,52	87,19	12,81%
8	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayama publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	106,92	80,62	19,38%
9	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja	Penyampaian Laporan Kinerja Secara Tepat Waktu dan Tepat Data	108,59	89,23	10,77%
10	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja	Jumlah Temuan SPI antar Tahun	100,86	94,12	5,88%

Sumber : e-sakip.jabarprov.go.id

3,7 Dukungan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat terdapat Pencapaian Idikator Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat,



Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Keterangan
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1,	Proposi kenaikan pendapatan Daerah antar tahun anggaran	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-2 Point "Laju Pertumbuhan Ekonomi"
		2,	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)	
2,	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	3,	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-3 Point "Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah"
7,	Meningkatnya modernisasi	4,	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-3 Point

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Keterangan
	informasi layanan pendapatan daerah	5,	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	“Indeks Keterbukaan Informasi Publik

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah, Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Dimasa mendatang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama,

Dispenda provinsi Jawa Barat sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar, Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, telah dilakukan langkah-langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang professional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat,

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal,

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi, Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan suatu kelebihan dari Dinas Pendapatan meliputi :

1. Dinas Pendapatan merupakan OPD yang diberi mandat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi dibidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan daerah;

2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan;
3. Terdapatnya Cabang-Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi yang tersebar luar diseluruh Kabupaten /Kota se Jawa Barat yang merupakan sub unit organisasi Dinas Pendapatan disertai dengan outlet-outlet layanan pembantunya dalam menjalankan visi,misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan;
4. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Dispenda Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Dinas Pendapatan yaitu :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah,
2. Belum terstandarisasinya secara penuh keseluruhan dukungan sarana dan prasarana kerja unit-unit operasional Dispenda yang tersebar di seluruh Kabupaten /Kota yang ada di Jawa Barat;
3. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar OPD penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah,
4. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar-benar akurat dan teruji,

Faktor Eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*)maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi, Beberapa peluang yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat;
2. Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat,
4. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi-potensi pendapatan untuk diintensifikasi, baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru,